



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7515-7525

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat

Anisa Fatmawati<sup>1✉</sup>, Setia Verayanti Raja Guk Guk<sup>2</sup>

(1) Universitas Wijayakusuma Purwokerto, (2) Universitas Diponegoro

Email: [Anisafatmawati96@gmail.com](mailto:Anisafatmawati96@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara rasio jumlah angkatan kerja dengan angkatan kerja yang telah memiliki pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, produk domestik regional bruto (PDRB) serta rata-rata lama sekolah. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel yakni data *cross-section* yang terdiri 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan data *time-series* yaitu pada tahun 2019-2021 melalui pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Kata Kunci: *Angkatan Kerja, PDRB, Upah, Pengangguran*

### Abstract

The open unemployment rate compares the ratio of the total labor force to the workforce that already has a job. This study aims to analyze the dynamics of the open unemployment rate in districts/cities of West Java Province, which is influenced by factors including district/city minimum wages, labor force, product gross regional domestic product (GRDP), and the average length of schooling. This research is a quantitative analysis using panel data, namely cross-section data consisting of 27 districts/cities in West Java Province, and time-series data, namely in 2019-2021, using the Fixed Effect Model approach. The study results show that district/city minimum wages and GRDP have a positive and significant effect on the open unemployment rate. In contrast, the labor force and the average length of schooling negatively and significantly affect open unemployment.

Keywords: *Labor Force, GDRP, Wages, Unemployment*

## PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah paling kompleks dalam perekonomian. Menurut Osman et al., (2015) pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang ditandai dengan tidak efisiensinya penggunaan sumber daya yang ada di pasar. Selain itu, pengangguran juga menjadi alasan utama penduduk di suatu negara hidup di bawah garis kemiskinan Meo et al., (2018). Secara umum pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja apabila tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang berusaha mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) mendefinisikan pengangguran merupakan penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan diri untuk mendirikan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka dapat dikatakan sebagai tuna karya. Tuna karya merupakan istilah untuk orang yang tidak dapat bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari seminggu atau sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak (Rambe et al., 2019). Di Indonesia sendiri, pengangguran terbuka masih menjadi masalah actual dan menjadi focus pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Namun upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran terbuka tidak selalu tanpa hambatan. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah adanya pandemic COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan penduduk melainkan pada sector ekonomi pada awal kemunculannya pada tahun 2020.

Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia tidak bergerak bahkan terjadi kelumpuhan ekonomi karena adanya pemberlakuan kebijakan *social distancing* atau masyarakat menyebutnya dengan menjaga jarak. Kebijakan *social distancing* memberikan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pada sector penggerak ekonomi diberbagai daerah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Maraknya PHK pada masa pandemi COVID-19 memperparah tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia meningkat tajam selama masa pandemic COVID-19. Hartanto dan Masjkuri (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi angka pengangguran akan menimbulkan dampak buruk pada perekonomian dan kondisi sosial di masyarakat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Menurut laporan publikasi BPS pada tahun 2019 TPT Jawa Barat sebesar 8,04% kemudian mengalami kenaikan menjadi 10,43% pada tahun 2020. Bahkan laporan data terbaru BPS per Agustus 2022 menyatakan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan tingkat pengangguran terbanyak di Indonesia

yaitu sebesar 8,31%. Masalah pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upah, angkatan kerja, PDRB, dan tingkat pendidikan.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat dipengaruhi oleh upah minimum kota/kab (UMK). Berdasarkan KEMNAKER (2008) yang dimaksud dengan upah minimum ialah upah yang dibayarkan setiap bulan dengan nilai minimum dan sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai perlindungan tenaga kerja. UMK yang berlaku pada setiap daerah didasarkan dari kehidupan hidup layak (KHL) dengan mempertimbangkan factor pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Upah minimum di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372,83 kemudian naik sebesar 8,51% menjadi Rp 1.810.351,36 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 upah minimum Jawa Barat memutuskan untuk tidak menaikkan UMP pada tahun tersebut. UMP Jawa Barat tidak mengalami kenaikan karena kondisi pandemic COVID-19. Teori A.W Philips menjelaskan hubungan upah minimum dengan pengangguran. Ketika upah minimum turun maka daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa sehingga permintaan tenaga kerja juga menurun dan menyebabkan pengangguran begitu pula sebaliknya. Penelitian Cahyani & Marhaeni, (2022) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negative terhadap tingkat pengangguran. Adanya kenaikan upah minimum akan mengakibatkan pengangguran menurun. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang mencari pekerjaan akan merasa bahwa kenaikan upah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengangguran merupakan salah satu bagian dari jumlah angkatan kerja pada suatu daerah. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia produktif usia 15 hingga 64 tahun yang aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi (memproduksi barang dan jasa) dan aktif dalam mencari pekerjaan. Angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari 23.993.348 jiwa pada tahun 2019 menjadi 24.743.628 jiwa pada tahun 2021. Penelitian Nisa dan Susilo (2018) menunjukkan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran dikarenakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi memiliki rata-rata angkatan kerja yang tinggi dan adanya persaingan dalam memperoleh pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Sedangkan penelitian Faliasari & Setiawan (2021) menyatakan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran. Adanya peningkatan angkatan kerja akan menyebabkan perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah.

Pengangguran juga berkaitan dengan GDP. Menurut Hukum Okun terdapat hubungan negative antara pengangguran dan GDP riil. Mankiw (2006) menjelaskan bahwa

adanya 1 persen kenaikan pada tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen atau lebih. Selama periode 2019-2021 PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi akibat adanya pandemi COVID-19.

Faktor lain selain UMK, angkatan kerja dan PDRB, tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dalam suatu daerah ataupun negara. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan dari 8,37 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,61 tahun pada tahun 2021. Semakin lama seseorang mengenyam pendidikan formal, maka kemampuan kerja semakin meningkat dan produktivitas kerjanya meningkat. Penelitian Yanthi & Marhaeni (2015) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengangguran sedangkan penelitian Hartanto dan Masjkuri (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Barat".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dari beberapa variabel yaitu tingkat pengangguran terbuka, upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, PDRB, dan rata-rata lama sekolah. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang dipublikasikan oleh BPS dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang UMK.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan tipe data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* yang digunakan adalah data mulai dari tahun 2019-2021. Sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah 27 kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-perilaku. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mempelajari dan mencatat data yang diperoleh dari BPS mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja, PDRB, dan Rata-rata Lama Sekolah serta Peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota. Teknik analisis dalam penelitian ini merupakan analisis regresi data panel. Berikut persamaan model dalam penelitian ini:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 AK_{it} + \beta_3 PDRB_{it} + \beta_4 RLS_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:

- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)  
 UMK : Upah Minimum (Kabupaten/Kota) (Ribu Rupiah)  
 AK : Angkatan Kerja (Jiwa)  
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Rupiah)  
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)  
 $\beta_0$  : Konstan  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien Regresi Berganda  
 $e$  : Variabel Pengganggu  
 $i$  : *cross-section*  
 $t$  : time-series

Persamaan (1) kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma untuk mendapatkan persamaan yang linier. Setelah diubah dalam bentuk Ln diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln UMK_{it} + \beta_2 \ln AK_{it} + \beta_3 \ln PDRB_{it} + \beta_4 \ln RLS_{it} + e_{it} \quad (2)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis regresi data panel, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Dari ketiga model tersebut akan dipilih satu model terbaik dengan melakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Berdasarkan hasil analisis pemilihan model yang sudah dilakukan menggunakan uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa *fixed effect model* yang terpilih menjadi model terbaik, sehingga tidak perlu melakukan uji lagrange multiplier. Menurut Basuki & Prawoto (2017) dalam analisis regresi data panel tidak semuanya menggunakan uji asumsi klasik pada metode Ordinary Last Square (OLS). Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian terbesar dari masalah pengujian asumsi klasik.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-230.0705	68.68375	-3.349708	0.0015
LOG(UMK)	28.01001	3.123438	8.967685	0.0000
LOG(AK)	-12.61520	4.976124	-2.535145	0.0144
LOG(PDRB)	5.512577	2.737502	2.013725	0.0494
LOG(RLS)	-29.37590	10.46678	-2.806583	0.0071
R-squared	0.924348	Mean dependent var		9.076543
Adjusted R-squared	0.878956	S.D. dependent var		2.347254
S.E. of regression	0.816642	Akaike info criterion		2.715774
Sum squared resid	33.34520	Schwarz criterion		3.632168
Log likelihood	-78.98884	Hannan-Quinn criter.		3.083443
F-statistic	20.36390	Durbin-Watson stat		3.017659
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2023

Berikut merupakan hasil dari persamaan penelitian dengan menggunakan *fixed effect model*:

$$\text{TPT} = -230.0705 + 28.01001 \ln \text{UMK}_{it} - 12.61520 \ln \text{AK}_{it} + 5.512577 \ln \text{PDRB}_{it} - 29.37590 \ln \text{RLS}_{it} + e_{it} \quad (3)$$

Tabel 1 menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0.878956, artinya sebesar variabel upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, produk domestic regional bruto, dan rata-rata lama sekolah mampu menjelaskan variable tingkat pengangguran terbuka sebesar 87,89% sedangkan sisanya yaitu sebesar 12,11% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Nilai probabilitas F pada hasil regresi *fixed effect model* sebesar 0.000 lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ , dapat disimpulkan bahwa upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, produk domestic regional bruto, dan rata-rata lama sekolah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

#### Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil regresi data panel, upah minimum kabupaten/kota memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ) dengan nilai artinya upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien upah minimum kabupaten/kota sebesar 28,01, nilai ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu persen pada upah minimum

kabupaten/kota maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 28.01 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pasuria & Triwahyuningtyas (2022) yang menjelaskan bahwa kenaikan rerata upah minimum di Indonesia akan mengakibatkan naiknya jumlah pengangguran dalam suatu wilayah. Selain itu penelitian Lukis Panjawa & Soebagiyo (2014) juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pengangguran akibat dari kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu ketidakmampuan upah untuk menyesuaikan ke titik ekuilibrium dimana *supply* tenaga kerja memenuhi permintaan tenaga kerja. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedua. Namun adanya kenaikan tingkat upah menyebabkan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja berkurang dan terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. Penyebab kekakuan upah antara lain: peraturan upah minimum, serikat pekerja dan efisiensi upah (Mankiw, 2012).

#### Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Angkatan kerja memiliki nilai probabilitas 0,0144 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,0144 < 0,05$ ), artinya angkatan kerja memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien angkatan kerja sebesar 12,61, artinya apabila terjadi kenaikan satu persen pada angkatan kerja maka akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,61 persen. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Filiyasi & Setiawan (2021) dimana angkatan kerja memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dikarenakan ketika terjadi pertambahan jumlah penduduk menunjukkan adanya kenaikan angkatan kerja. Fenomena tersebut menyebabkan perusahaan lebih mudah memperoleh tenaga kerja dan upah yang ditawarkan perusahaan menjadi rendah, Adanya kelebihan penawaran pekerjaan memberikan dampak pada para pekerja untuk berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan.

#### Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Produk domestik regional bruto memiliki nilai probabilitas 0,0494 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,0494 < 0,05$ ), artinya produk domestik regional bruto memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien produk domestik bruto sebesar 5,51, artinya apabila terjadi kenaikan sebesar satu persen pada produk domestik regional bruto maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,51 persen. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuzulaili (2022) yang menjelaskan bahwa hubungan positif antara PDRB dan pengangguran, hasil ini berbeda dengan teori hukum okun. Teori hukum okun menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negative antara pengangguran dengan PDRB. Peningkatan pengangguran cenderung

dikaitkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila pertumbuhan ekonomi menurun maka pengangguran akan meningkat dan sebaliknya. Penelitian Nuzulaili (2022) juga menjelaskan bahwa PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan di Pulau Jawa disebabkan karena proses produksi di Pulau Jawa cenderung padat modal (*capital intensive*). Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa Provinsi Jawa Barat kemungkinan besar melakukan proses produksi dengan menggunakan *capital intensive*. *Capital intensive* sendiri diartikan sebagai penggunaan modal yang lebih besar dan penggunaan teknologi yang lebih modern dibandingkan dengan sumber daya manusianya. *Capital intensive* terjadi apabila ketrampilan dan tenaga kerja rendah sehingga perusahaan menginginkan untuk meningkatkan modal dan menggunakan teknologi terkini untuk mencapai efisiensi produksi dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

#### Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Rata-rata lama sekolah memiliki nilai probabilitas 0,0071 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $0,0071 < 0,05$ ), artinya rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar 29,37. Nilai koefisien ini memiliki arti apabila terjadi kenaikan satu persen pada rata-rata lama sekolah maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 29,37 persen. Berdasarkan peningkatan rata-rata lama sekolah pada tahun 2019-2021 mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat juga cenderung mengalami peningkatan. Menurut Todaro (2000) menyatakan bahwa umumnya pada negara berkembang, salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan serta memberikan kehidupan yang lebih baik ialah pendidikan. Dengan demikian melalui kualitas pendidikan yang lebih baik pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka akan memiliki potensi yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang akan menambah jumlah angkatan kerja yang bekerja sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustakim et al., (2022) yang menyatakan bahwa apabila rata-rata lama sekolah meningkat maka mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di kota Kendari tahun 2010-2021. Penelitian Xing et al., (2018) juga menjelaskan bahwa mobilitas pekerja yang memiliki pendidikan tinggi dapat membantu mengurangi pengangguran dengan mengembangkan ekonomi local.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, produk domestik regional bruto serta rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021 maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Tingginya upah minimum di suatu wilayah akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK, dengan demikian akan mengakibatkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Angkatan Kerja berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Adanya peningkatan kerja menyebabkan perusahaan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja dan upah yang ditawarkan semakin rendah. Hal ini menimbulkan kelebihan penawaran pekerjaan sehingga para pekerja berlomba-lomba dapat mendapatkan pekerjaan.

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Tingginya PDRB pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengindikasikan bahwa meningkatnya proses produksi di wilayah tersebut menambah jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut karena dalam proses produksi di Jawa Barat cenderung menggunakan padat modal (*capital intensive*) yaitu penggunaan sumber daya manusia lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan modal atau penggunaan teknologi yang lebih modern.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meningkatnya pendidikan pada masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mempengaruhi jumlah angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan dan tenaga kerja yang berpendidikan mampu membantu mengembangkan potensi ekonomi local.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan peneliti selanjutnya mampu menganalisis tingkat pengangguran terbuka dengan menambahkan variabel-variabel yang belum diteliti pada penelitian ini serta menambah periode penelitian agar mampu melihat secara jelas terkait factor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Selain itu diharapkan untuk pihak pemerintah Jawa Barat menciptakan lapangan pekerjaan agar tenaga kerja dapat terserap dengan baik dan mampu mengurangi pengangguran di Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, N. P. M., & Marhaeni, A. A. I. . (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sarbagita. *E-Jurnal EP Unud*, *11*(5), 2050–2051.
- Filiari, A., & Setiawan, A. H. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(3), 1–10.
- Gujarati, D. N. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima. Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartanto, T. B. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovisi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, *2*(1), 20–29. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5502>
- KEMNAKER. (2008). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2013. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 1–69.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1220-Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten kota Di Jawa Barat Tahun 2019, Bandung.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- Lukis Panjawa, J., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(1), 48–54.
- Meo, M. S., Khan, V. J., Ibrahim, T. O., Khan, S., Ali, S., & Noor, K. (2018). Asymmetric impact of inflation and unemployment on poverty in Pakistan: new evidence from asymmetric ARDL cointegration. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, *28*(4), 295–310. <https://doi.org/10.1080/02185385.2018.1523745>
- Mustakim, A., Ferlin, & Rizal. (2022). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari Tahun 2010-2021. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 209–216. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.140>
- Nuzulaili, D. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, *6*(2), 228–238. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20473>

- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Osman, M. M., Bachok, S., Muslim, S. A., & Bakri, N. I. M. (2015). Unemployment Issues and Problems in Kinta, Manjung and Kuala Kangsar, Perak, Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 168, 389–399. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.245>
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 795–808. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.94>
- Priastiwi, D., & Handayani, H. R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/view/4058>
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani. (2019). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi* (Vol. 8, Issue 1).
- Xing, C., Yang, P., & Li, Z. (2018). The medium-run effect of China's higher education expansion on the unemployment of college graduates. *China Economic Review*, 51(January 2017), 181–193. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.05.005>
- Yanthi, C. I. D. P., & Marhaeni, A. A. I. N. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Piramida*, 11(2), 68–75.